

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk mengetahui adanya keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi para penduduknya. Negara Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dari negara yang lain.

Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, sebaliknya pertumbuhan negatif akan menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pendapatan perkapita yang relatif tinggi disebut negara atau wilayah makmur. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan adanya dukungan dari sumber daya ekonomi yang cukup.²

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Pertumbuhan ekonomi selalu diprioritaskan karena adanya pertumbuhan ekonomi

² Darwin Damanik dan Elidawaty Purba, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar," *Jurnal Edueco* 5, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.36277/edueco.v5i1.>, hlm. 1

mengindikasikan adanya pertambahan pendapatan perkapita.³ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Syahputra yang menyatakan bahwa:

“Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional.”⁴

Apabila kita membicarakan masalah pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu ada faktor yang perlu diketahui antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, modal, dan teknologi. Sumber Daya Manusia menjadi faktor produksi yang penting karena sumber daya manusia bisa melakukan dua peran dalam melakukan dua produksi untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peran itu antara lain sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha atau seseorang yang mengkombinasikan seluruh faktor produksi dalam proses produksi.⁵

Setiap wilayah pasti mengusahakan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5,34 persen.⁶

³ Aris Budi Susanto dan Lucky Rachmawati, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013): 1–18, <https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p.>, hlm 1

⁴ Rinaldi Syahputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 2 (2017): 183–91, <https://doi.org/doi.org/10.1234/jse.v1i2.334.>, hlm 183

⁵ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Ekonomi Dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 12

⁶ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, “Ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 Tumbuh 5,34 Persen,” 2023, <https://jatim.bps.go.id.>, diakses 29 Januari 2024

Salah satu wilayah yang sering kita ketahui di Jawa Timur yaitu dengan istilah Eks Karesidenan Kediri. Wilayah Eks Karesidenan Kediri terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri dan Kota Blitar. Kawasan tersebut dulunya merupakan Karesidenan Kediri, tetapi pada tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia menghapus karesidenan sebagai pembagian administratif negara.⁷

Daerah Eks Karesidenan Kediri secara geografis memiliki akses yang baik ke pusat-pusat ekonomi regional atau di kenal dengan kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya atau Malang.⁸ Mempunyai potensi alam serta budaya yang beragam. Potensi tersebut seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lain-lain, jika terdapat inovasi yang lebih baik sehingga hasil dari pemanfaatan tersebut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Letak Eks Karesidenan Kediri yang strategis tersebut memudahkan aktivitas dalam distribusi barang antar daerah.

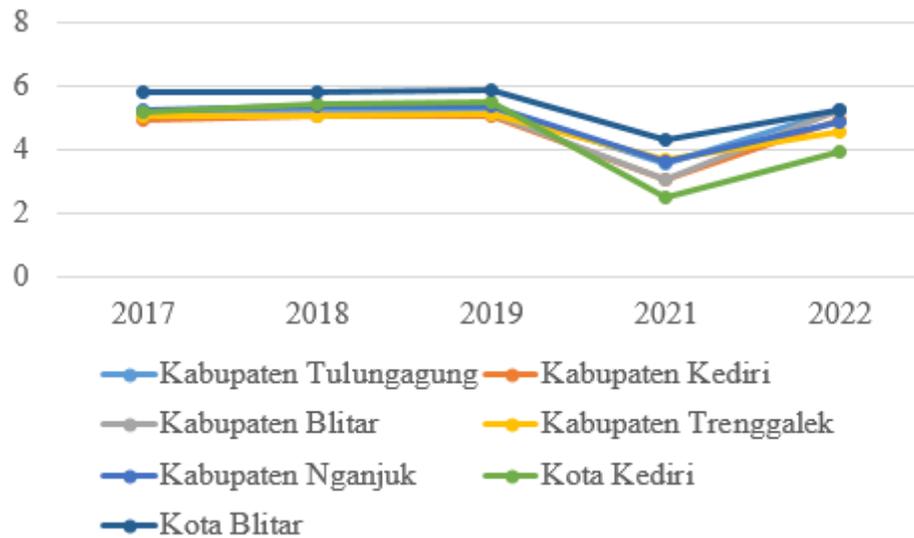
Pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian yang ada di kabupaten / kota tersebut dari berbagai sektor dan kehidupan masyarakat. Berikut Gambar 1.1 mengenai data persentase pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.

⁷ Linawati dan Suhardi, "Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Moderasi Alokasi Belanja Modal," *Ekuivalensi* 3, no. 2 (2017): 19–28, <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/54.>, hlm. 22

⁸ Linawati, Mar'atus Solikah, dan Zaman Badrus, "Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Kediri," *Majalah Ekonomi* 23, no. 1 (2018): 60–71, <https://jurnal.unipasby.ac.id>.

Gambar 1.1

Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Kediri



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah⁹

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri pada 5 tahun terakhir yaitu 2017, 2018, 2019, 2021 dan 2022 mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2022, keseluruhan kabupaten mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar Kabupaten Tulungagung (5,22 persen), Kabupaten Kediri (4,9 persen), Kabupaten Blitar (5,2 persen), Kabupaten Trenggalek (4,52 persen), Kabupaten Nganjuk (4,84 persen), Kota Kediri (3,95 persen) dan Kota Blitar (5,22 persen).

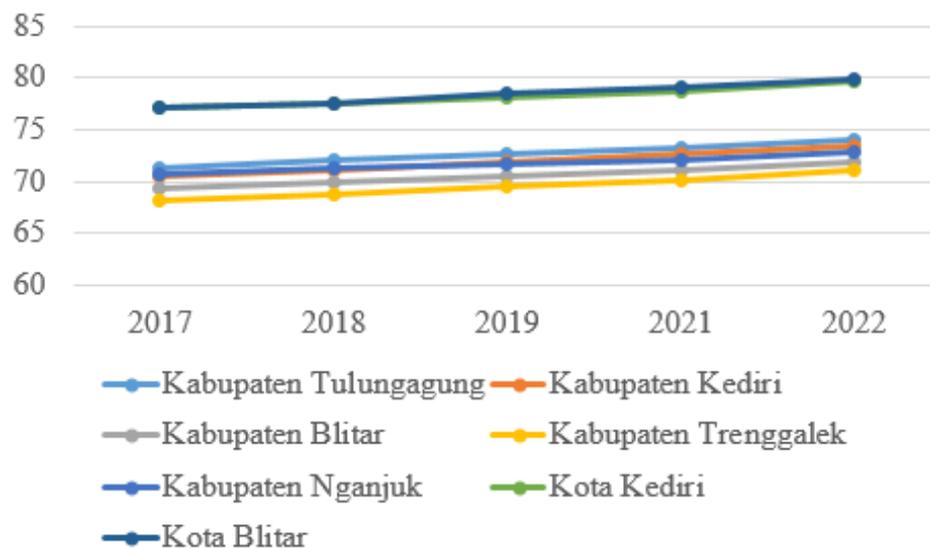
Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan mendorong

⁹ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Dan Kota Blitar Dalam Angka 2017-2023," 2023, <https://bps.go.id.>, diakses 5 Januari 2024

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Aspek terpenting dalam IPM meliputi peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga aspek tersebut satu sama lain saling berkaitan. IPM menggambarkan sejauh mana wilayah telah menggunakan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia.¹⁰ Berikut Gambar 1.2 data Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Kediri.

Gambar 1.2

Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Eks Karesidenan Kediri



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah¹¹

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021 sampai 2022 seluruh kabupaten atau kota di Eks Karesidenan Kediri secara terus-menerus mengalami peningkatan terkait

¹⁰ Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press, 2013), hlm. 109

¹¹ Statistik, "Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Dan Kota Blitar Dalam Angka 2017-2023."..., diakses 5 Januari 2024

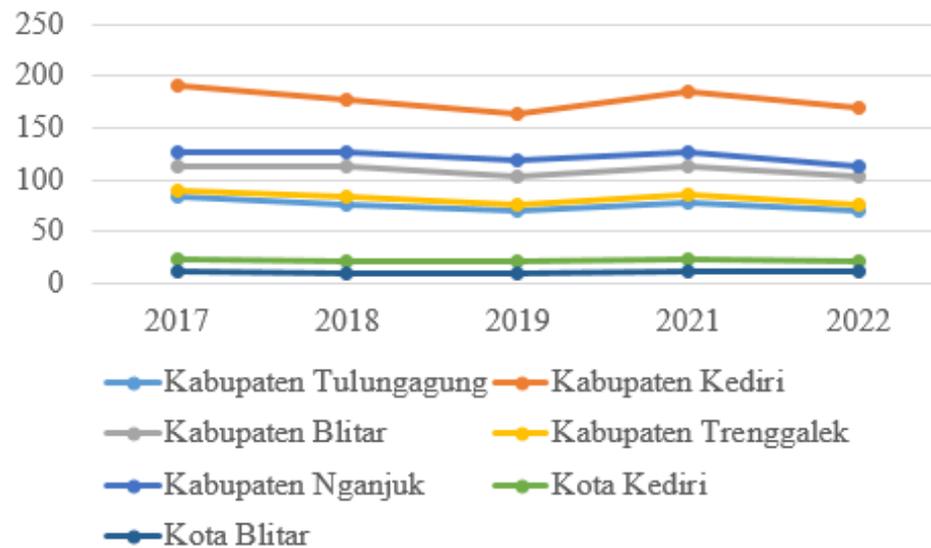
Indeks Pembangunan Manusia di wilayahnya. Berdasarkan data tersebut, 3 kabupaten atau kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi tahun 2022 yaitu Kota Blitar, Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung, sedangkan persentase Indeks Pembangunan Manusia terendah pada tahun 2022 yaitu di Kabupaten Trenggalek.

Upaya pemerintah kabupaten atau kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu mengurangi tingginya kemiskinan yang akan berdampak pada meningkatnya biaya pembangunan dan menghambat jalannya pembangunan. Kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai derajat hidup yang layak. Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasarnya.¹² Berikut Gambar 1.3 data penduduk miskin (kemiskinan) di Eks Karesidenan Kediri.

¹² Alvy Kusumawati, Wiwin Priana Primandhana, dan Muhammad Wahed, “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur,” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 118–22, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.253>., hlm. 119

Gambar 1.3

Data Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Eks Karesidenan Kediri



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah¹³

Berdasarkan Gambar 1.3 data masyarakat miskin di Eks Karesidenan Kediri pada 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, tetapi pada tahun 2022 keseluruhan kabupaten atau kota di Eks Karesidenan Kediri mengalami penurunan masyarakat miskin. Hal ini bentuk upaya pemerintah setempat dalam mengatasi kemiskinan sehingga berdampak positif pada penurunan tersebut hingga tahun berikutnya.

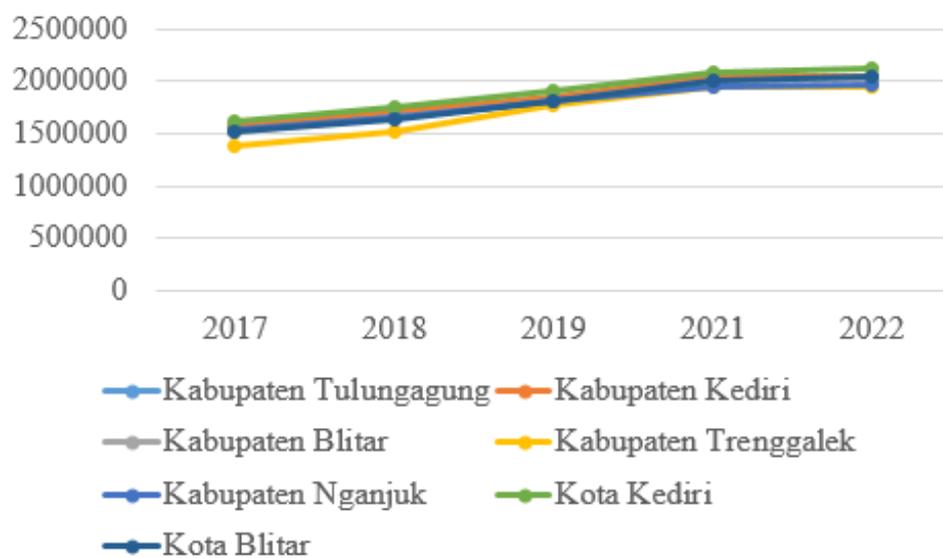
Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin banyak dan biaya hidup yang semakin meningkat, maka adanya Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dari upah yang terlalu rendah dan mendorong keadilan pekerja dan

¹³ Statistik, “Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Dan Kota Blitar Dalam Angka 2017-2023.”..., diakses 5 Januari 2024

pengusaha dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.¹⁴ Berikut Tabel 1.4 terdapat perkembangan Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Eks Karesidenan Kediri.

Gambar 1.4

**Perkembangan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Eks
Karesidenan Kediri**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah¹⁵

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan Upah Minimum Kabupaten atau Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan adanya peningkatan tersebut menjadi motivasi para pekerja di Kabupaten Eks Karesidenan Kediri dalam melakukan pekerjaan dengan giat. Pada tahun 2022, Upah Minimum Kabupaten atau Kota tertinggi yaitu di Kota

¹⁴ Suprihatin Lestari dan Ria Repa Susana, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 56–70, <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/260>., hlm 58

¹⁵ Statistik, "Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Dan Kota Blitar Dalam Angka 2017-2023."..., diakses 5 Januari 2024

Kediri sebesar Rp 2.118.117 dan Upah Minimum Kabupaten terendah yaitu di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 1.944.933.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri?
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.
3. Untuk menguji pengaruh Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.
4. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri, serta dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pembangunan ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, serta dapat menjadi masukan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa lain ataupun pihak lain yang membutuhkan, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Memberikan kontribusi dalam kepastakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian hampir sama dengan menggunakan variabel yang berbeda.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Eks Kresidenan Kediri meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar,

Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri dan Kota Blitar. Penelitian ini mengkaji tentang Indeks Pembangunan Manusia (X1), kemiskinan (X2), dan Upah Minimum Kabupaten / Kota (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Kediri (Y). Penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan sumber lainnya.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian digunakan untuk mengantisipasi ketidakjelasan dan melebarnya penelitian. Batasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan obyek yaitu Eks Karesidenan Kediri. Selanjutnya terkait pencarian data dari website BPS Kabupaten Tulungagung, BPS Kabupaten Kediri, BPS Kabupaten Blitar, BPS Kabupaten Trenggalek, BPS Kabupaten Nganjuk, BPS Kota Kediri, dan BPS Kota Blitar, dan sumber lain yang mendukung serta waktu penelitian yang terbatas.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi dari beberapa istilah kunci dalam proposal skripsi ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan pendapat Darwin, Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup. Kualitas hidup masyarakat yang baik akan tercapainya kesejahteraan kehidupan melalui peningkatan produktivitas, kesejahteraan sosial, serta daya saing ekonomi.¹⁶

b. Kemiskinan

Berdasarkan pendapat Muthalib, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau keluarga yang serba kekurangan.¹⁷

c. Upah Minimum Kabupaten / Kota

Berdasarkan pendapat Juwita, Pemerintah telah mengatur Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.¹⁸

d. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pendapat Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana perkembangan kegiatan dalam perekonomian

¹⁶ Darwin dan Lora Dkk, *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), hlm. 12

¹⁷ Abd Aziz Muthalib, *Kewirausahaan (Studi Alternatif Pengentasan Kemiskinan Melalui UMKM)* (Yogyakarta: Kurnia Global Diagnostika, 2015), hlm. 2

¹⁸ Ni Kadek Vina Ardiana Dewi dan I Komang Gde Bendesa, "Analisis Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 3 (2020): 595–625, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/50986>.

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana variabel akan diukur, seperti langkah-langkah yang harus diikuti, instrumen yang digunakan, dan kriteria yang harus dipenuhi. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Kediri”, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menguji seberapa berpengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Kediri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi sangatlah dibutuhkan dalam melakukan penelitian supaya mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan penelitian yaitu:

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 423

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi teori yang membahas mengenai semua variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi hasil penelitian (deskripsi data penelitian dan pengujian hipotesis).

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut.